

**IMPLEMENTASI PROGRAM FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN  
PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KECAMATAN PADANG  
HILIR KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Oleh : Ridho Afandi**

**Pembimbing: Zulkarnaini S.Sos., M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax.  
0761-63277

***Abstract***

*The implementation of program facilitation and stimulation the construction of housing among the less well-off is rehabilitation program to the roof, the floor and the walls of held by Tebing Tinggi city regional government given to low income people the effect on greater the condition of the poor. The purpose of this research to review and analyze The Implementation Of Program Facilitation And Stimulation The Construction Of Housing Among The Less Well-Off In Padang Hilir Sub District Tebing Tinggi City North Sumatra Province. The concept of the theory used is communication, resources, disposition and bureaucracy structure. Researcher used the theory George C.Edwards III. Researcher from is provided by way of qualitative research was conducted. Collecting data used the technique of observation, interviews and documentation. Informants chosen using a technique purpose of sampling the sample decided not randomly. The results of this research program has been done our best but in the implementation stage did not go entirely according to plan there is still going on a problem associated with factors obstacles in the field on a time of inaccurate, labor implementation and inaccurate development goals.*

***Keywords : Implementation, Construction, Among The Less Well-Off***

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat terhadap masyarakat miskin yaitu permasalahan bangsa yang mendesak yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Biasanya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dengan adanya kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sejak tahun 2001 dalam bentuk Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu berupa Atap, Lantai dan Dinding (ALADIN).

Program Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang bertujuan membantu keluarga kurang mampu untuk memiliki rumah layak huni, sehat dan asri, juga dimaksudkan untuk mendorong kepedulian sosial masyarakat dan sekaligus membangkitkan semangat gotong royong masyarakat untuk bersama-sama membantu membangun rumah keluarga kurang mampu dengan bahan-bahan bangunan yang disediakan pemerintah Kota Tebing Tinggi. Dasar hukum pelaksanaan Program Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu menetapkan dalam peraturan Walikota Tebing Tinggi melalui Keputusan Kepala Walikota Kota Tebing Tinggi Nomor 480 Tahun 2018 tentang pedoman umum pelaksanaan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu kota Tebing Tinggi tahun 2018.

Program Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu atau Program rumah Aladin ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan infrastuktur dasar masyarakat yaitu perumahan atau permukiman yang dilaksanakan berdasarkan penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan penanggulangan permasalahan kemiskinan melibatkan unsur instansi pemerintah, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang diwujudkan dengan pelaksana kegiatan di tingkat kelurahan, yang diharapkan kegiatan ini mampu menangani persoalan kemiskinan menuju ke arah yang lebih baik atau berkembang menuju positif dalam kegiatan ekonomi, sosial dan sumber daya.

Dampak program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin terhadap lingkungan kumuh. Seperti dampak positif terhadap kesejahteraan psikologis rumah tangga miskin, memiliki rumah yang layak mendorong rumah tangga miskin untuk melakukan perbaikan tambahan pada rumah mereka dan modal sosial memainkan peran penting dalam prosesnya. Sasaran dari program ini adalah masyarakat yang tergolong kurang mampu dalam urusan di bidang ekonomi contoh terutamanya membuat rumah tempat tinggalnya sendiri. Kriteria masyarakat yang menerima bantuan dari program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu yaitu :

1. Keluarga tidak mampu yang memiliki tanah sendiri yang ditandai dengan surat kepemilikan tanah atas nama sendiri.
2. Kondisi rumah :
  - a. Atap rumah terbuat dari rumbia dan sudah bocor
  - b. Dinding rumah masih dari papan ataupun tepas yang sudah tidak layak pakai
  - c. Lantai rumah masih dari tanah

3. Memiliki KTP dan Kartu Keluarga.
4. Diusulkan oleh Lurah.
5. Disetujui oleh Tim yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Walikota Tebing Tinggi.

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program pembangunan rumah masyarakat kurang mampu yaitu :

1. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi membuat surat keputusan yang isinya tentang Persyaratan Calon Penerima Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kota Tebing Tinggi.
2. Petugas survey lapangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi mengadakan rapat yang isinya tentang hasil Tim Survey Lapangan terhadap usulan calon penerima bantuan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kota Tebing Tinggi.
3. Petugas survey lapangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi dan instansi terkait mengadakan rapat yang isinya tentang penetapan nama-nama penerima bantuan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kota Tebing Tinggi atau dalam pertemuan tersebut petugas survey lapangan mengexpose keberadaan rumah tidak layak huni untuk dibahas bersama apakah layak dibantu atau tidak.
4. Menyampaikan surat permintaan kepada Lurah sekota Tebing Tinggi untuk segera menyampaikan daftar nama-nama masyarakat yang akan ditetapkan sebagai penerima bantuan.
5. Dilaksanakan sosialisasi kepada nama-nama penerima bantuan tentang pelaksanaan kegiatan bantuan. Para penerima bantuan dalam pertemuan tersebut telah membuat pernyataan akan selesai melaksanakan pembangunan selama 60 (enam puluh) hari. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh peserta penerima bantuan, tim survey dan Kepala Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi.

6. Mendistribusikan seluruh bahan-bahan bangunan yang telah ditetapkan dan diterima oleh para penerima bantuan sesuai dengan bukti pendistribusian.
7. Menyampaikan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi untuk segera diterbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan.
8. Melaksanakan peletakan batu pertama di rumah salah satu penerima bantuan secara simbolis yang dilakukan oleh Walikota Tebing Tinggi yang dihadiri oleh seluruh instansi terkait.
9. Diserahkan Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada penerima bantuan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kota Tebing Tinggi.

Anggaran program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dalam bentuk bantuan rehabilitasi dari tahun 2001 sampai sekarang bermula dari 10 juta, 15 juta dan sekarang 20 juta untuk satu rumah. Dana program ini, tergantung pemberian APBD daerah Kota Tebing Tinggi. Peningkatan alokasi anggaran untuk program ini juga dalam rangka penyesuaian harga-harga bangunan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga bahan-bahan bangunan yang diberikan tetap terjaga kualitasnya. Dalam melaksanakan program ini diwajibkan dan ditetapkan oleh pemerintah menyelesaikan hasil pekerjaannya dalam jangka waktu 2 bulan setelah bahan-bahan bangunan didistribusikan yang dilakukan oleh pemborong.

Dalam program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, ada beberapa masalah yaitu :

1. Tidak sesuainya perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan rumah masyarakat kurang mampu, tenaga kerja pembangunan

seharusnya melibatkan masyarakat lingkungan sekitar dibantu oleh pokmas yang dipilih oleh musyawarah masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan rumah tidak layak huni tetapi dilakukan oleh pemborong dan tenaga kerja bangunan.

2. Dalam perencanaan pembangunan rumah masyarakat kurang mampu, pembangunan rumah ini dibangun untuk masyarakat miskin tetapi pada kenyataannya bahwa rumah sudah mendapatkan bantuan program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu ingin memperbesar rumahnya sehingga dinyatakan bahwa yang menerima bantuan tidak tepat sasaran atau masyarakat yang mampu untuk membangun rumahnya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah.

Berdasarkan fenomena diatas, tentu dapat menimbulkan kerugian-kerugian baik dari pemerintah maupun masyarakat, maka itu peneliti tertarik untuk menindaklanjuti dalam menganalisa lebih lanjut bagaimana pelaksanaan program pembangunan rumah masyarakat kurang mampu di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi penelitiannya yang berjudul : **“Implementasi Program Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara”**.

## **TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Implementasi Program Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.
2. Untuk menganalisis Faktor-Faktor Penghambat Implementasi

Program Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan Ilmu Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan implementasi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu serta sebagai salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## **METODE**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data yang ada dengan berusaha memberikan gambaran terperinci dari berbagai sumber dengan menghubungkan fenomena serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Pembangunan Program Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Mengambil atau memilih informan dengan menggunakan teknik *purpose sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang secara sengaja yaitu peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak tapi ditentukan sendiri. Analisa data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yaitu selain melalui wawancara dan observasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi, masyarakat penerima bantuan serta pemborong yang

terlibat dalam program ini, peneliti menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti kemudian data-data tersebut dijabarkan secara deskriptif sesuai dengan kenyataan implementasi program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Kota Tebing Tinggi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Program Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara**

Proses peninjauan implementasi program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara peneliti mengklasifikasikan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Edwards III menjadi empat aspek, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, ide-ide dari komunikator ke komunikan diantara anggota secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan atau menerapkan program pembangunan rumah masyarakat kurang mampu hal yang paling dibutuhkan adalah komunikasi. Dalam pengaruhnya komunikasi pelaksanaan program sikap dan tanggap dari antar pelaku yang terlibat sangat dibutuhkan agar keefektifan dalam pelaksanaan program tersebut berjalan lancar. Karena itu bahwa dalam suatu kegiatan yang dilakukan tanpa atau kurangnya proses komunikasi antar pelaku

yang terlibat hasilnya akan kurang optimal atau berantakan. Lebih jelasnya dalam informasi yang diperoleh para pembuat keputusan mengetahui dan mengambil keputusan mengenai apa yang akan mereka kerjakan sehingga mengenai informasi bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Sehingga komunikasi dapat disimpulkan sebagai salah satu yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sebab komunikasi merupakan menjadi kunci dari tindakan yang tepat bagi pelaksana dalam pelaksanaan program tersebut serta memperlancar atau menenangkan proses penghubung antar pihak terkait.

Sering kali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yang disebabkan banyaknya atau berlapis-lapis tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, karena begitu rumit dalam tahapan pelaksanaan program rumah masyarakat kurang mampu sehingga penyaluran komunikasi sangat penting dalam kemajuan implementasi program rumah Aladin di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Karena itu pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja perlu melakukan komunikasi dalam tahapan pelaksanaan program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.

Komunikasi yang digunakan dalam implementasi program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu masih belum optimal dalam sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat penerima bantuan karena dalam pelaksanaan terdapat rumah yang memperbesar bangunan, dalam tahap rencana rumah hanya direhab atap, lantai dan dinding.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya adalah sesuatu yang bernilai dan memiliki manfaat atas penggunaannya terhadap kelangsungan hidup maupun pencaipan dari suatu tujuan tertentu. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik tapi juga bersifat non fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar atau hilang, dan ada juga yang kekal (tetap). Setiap sumber daya memiliki kegunaan yang lebih spesifik dan memiliki ciri tersendiri, ada yang berguna bagi kehidupan daerah itu sendiri dan ada yang berguna bagi daerah lain.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi memerlukan sumber daya sebagai penunjang yang mendukung terwujudnya tujuan yang diinginkan. Sebab sumber daya sangat berperan dalam aktifitas pelaksanaan suatu program yang dimana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi tidak akan mampu bertindak dalam pelaksanaan program rumah Aladin tanpa adanya sumber daya, karena sumber daya yang menjalankan proses aktifitas yang telah direncanakan. Perencanaan sumber daya yang matang dan cermat yaitu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan aktifitas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi. Proses operasional pengorganisasian, aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh pegawai didalam Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi membutuhkan dukungan anggaran.

Sumber daya dalam implementasi program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu begitu penting, dukungan akan anggaran mengalami ketergantungan akan rencana yang disusun. Tanpa adanya anggaran pelaksanaan program tidak akan berjalan. Dan juga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sudah mengatur anggaran yang didapat dengan cermat dan matang sehingga bisa berjalan dengan lancar pelaksanaan program rumah tidak layak huni.

## 3. Disposisi

Disposisi dalam pengertiannya adalah suatu keinginan, kemauan, dan kecenderungan bagi para pelaku kebijakan atau pembuat rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan yang ditetapkan secara sungguh-sungguh. Dalam disposisi tentunya memberikan kemungkinan dasar dalam setiap kegiatan organisasi memberikan kelengkapan dan kesiapan penuh untuk bertindak. Ini harus diperoleh lewat praktek yang merupakan tujuan dan tenaga pendorong yang terdapat dalam setiap disposisi. Sebagaimana tetapi tidak disposisi setiap melakukan aktivitas bergantung pada keputusan yang dibuat. Sikap penerimaan dari pelaksana program sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi program. Hal ini sangat lah mungkin terjadi karena program yang dilaksanakan bukanlah hasil pemikiran warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang dirasakan. Tetapi pelaksana program kegiatan yang mengambil keputusan dalam mengetahui keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Disposisi bisa dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting dalam implementasi program yang efektif. Hal itu terlihat jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi program maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi program akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal yang ditetapkan. Demikian hal sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi program karena konflik kepentingan maka implementasi program akan menghadapi kendala yang serius.

Disposisi dalam implementasi program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu adalah sikap pelaksana terutama petugas survey lapangan sudah bersikap, mau menerima tugas dengan

baik yaitu mendata, mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap penerima bantuan tapi kenyataan di lapangan masih kurang dalam mengawasi jalannya pembangunan rumah terbukti ada yang tidak tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan salah satu instansi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Birokrasi yaitu suatu institusi yang terorganisir secara teratur yang dilaksanakan oleh serangkaian prosedur atau aturan-aturan yang bersifat tetap yang dilaksanakan oleh sistem administrasi, adapun rantai komandonya berupa hirarki kewenangan yang mana berjalan atau mengalir dari atas ke bawah. Struktur organisasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai hirarki. Kekuatan utama birokrasi adalah terletak pada kemampuannya menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara efisien.

Implementasi program seperti implementasi program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu program, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan program. Maka itu dalam memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang menjadi dasar untuk mengkaji implementasi program. Dalam struktur birokrasi terdapat dua indikator yaitu :

##### **a. Fragmentasi**

Fragmentasi dalam organisasi ialah pembagian tugas diantara lembaga-lembaga organisasi, masing-masing lembaga

memiliki tugas tertentu. Fragmentasi dalam hal ini dapat menunjukkan derajat spesialisasi dimana tiap lembaga didorong oleh keinginan dalam mengembangkan kemampuannya dalam menjalankan tugas yang mampu merespons permasalahan publik yang cenderung semakin kompleks atau rumit. Maka dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tebing Tinggi ditunjuk untuk mengatasi masalah masyarakat miskin terutama tempat tinggal, proyek pembangunan rumah masyarakat kurang mampu dijadikan sasaran dalam menjalankan tugasnya. Dalam implementasi program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu pembagian tugas pegawai untuk melaksanakan pembangunan rumah tidak layak huni perlu dilakukan agar berjalan efektif.

Pembagian tugas yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang memiliki tugas sebagai pelaksana kegiatan sudah dilakukan dengan baik dengan membentuk petugas survey lapangan yang tugasnya mengevaluasi dan mengawasi penerima bantuan dan juga ada yang lurah dan pokmas memberikan data-data penerima bantuan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan membantu di lapangan jika diperlukan serta peran pemborong dalam menyuplai bahan bangunan ke penerima bantuan program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.

##### **b. Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Dalam struktur birokrasi adanya standar penilaian kinerja para pegawai, prosedural tata kerja serta sistem kerja dan prosedur kerja pada unit kerja yang dimana

untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program. Acuan atau pedoman dalam melakukan pekerjaan untuk mengetahui dengan jelas peran serta fungsi tiap pegawai dalam melaksanakan suatu program. Sebagai standar cara yang dilakukan pegawai dalam mengetahui cara menyelesaikan suatu pekerjaan dengan melakukan tindakan mengurangi kesalahan serta kelalaian dalam pekerjaan. SOP sebagai pedoman bagi pelaksana program yang dimana ketentuan untuk mengetahui apa yang benar atau salah yang selanjutnya dilakukan tindakan dalam menyelesaikan masalah.

SOP yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menurut rencana yaitu anggaran yang diperlukan, waktu yang tepat dalam penyelesaian serta asaran yang tepat dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat kurang mampu tapi kenyataannya belum sesuai dengan rencana, waktu tidak tepat dalam penyelesaian pembangunan.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara**

Dalam implementasi program pembangunan rumah masyarakat kurang mampu tidak mudah untuk berjalan dengan mulus. Risiko yaitu hambatan yang mungkin terjadi tiba-tiba.

Adapun Faktor-faktor penghambat dalam implementasi fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

### **1. Ketidaktepatan Waktu**

Dalam implementasi program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu waktu pelaksanaan pengerjaan telah ditetapkan dalam pembangunan rumah layak huni yang dituju ke penerima bantuan yaitu masyarakat miskin yang dijadwalkan menyelesaikan serta menyerahkan hasil kerja dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pendistribusian bahan bangunan. Walaupun telah ditetapkan waktu pelaksanaan pembangunan rumah layak huni tapi tidak semuanya rencana yang ditetapkan akan berjalan dengan semestinya tentu dalam pelaksanaan program akan menemukan kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Ketidaktepatan waktu dalam implementasi program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu yang menjadi faktor untuk mencapai sasaran dalam perencanaan program ini, terlambatnya penyelesaian dalam pelaksanaan pembangunan rumah masyarakat kurang mampu dikarenakan cuaca tidak mendukung dan pendistribusian bahan bangunan yang tiba-tiba ada masalah.

### **2. Tenaga Kerja Pelaksana**

Dunia pembangunan identik dengan tenaga kerja lapangan, bagaimanapun juga tenaga kerja pelaksana pembangunan sangat penting dalam pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni dibutuhkannya pelaksana program agar dapat berjalan proses pembangunan. Pentingnya tenaga kerja pembangunan membuatnya menjadi modal dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan. Dalam pedoman keputusan walikota Tebing Tinggi tentang pelaksanaan fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu kota Tebing Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan

Stimulasi perumahan swadaya, tenaga kerja pelaksana dalam pelaksanaan pembangunan rumah masyarakat kurang mampu adalah masyarakat sekitar lingkungan yang menerima bantuan rumah Aladin yang dibantu dengan pokmas (kelompok masyarakat) yang dipilih secara musyawarah oleh masyarakat serta masyarakat sekitar dengan melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan rumah tidak layak huni.

Tenaga Kerja pelaksana seharusnya melibatkan masyarakat dalam pengerjaan seperti dalam mengawasi jalannya pembangunan rumah masyarakat kurang mampu tapi yang mengerjakan hanya pemborong yang mengantar bahan bangunan ke rumah penerima bantuan dan pekerja bangunan yang disewa sama pemilik penerima bantuan.

### **3. Ketidaktepatan Sasaran Pembangunan**

Selain waktu dan tenaga kerja, sasaran pembangunan juga berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu adalah sasaran yang akan dituju yaitu masyarakat miskin yang tidak bisa memperbaiki rumahnya sendiri dalam artian program yang dilaksanakan untuk membantu masyarakat miskin memiliki rumah layak huni sehingga rumah tersebut dapat dijadikan tempat tinggal yang nyaman dan tempat berkomunikasi bagi anggota keluarga sehingga terhindar dari lingkungan kumuh. Dalam pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan rumah yang tidak tepat sasaran yaitu bangunan rumahnya diperbesar atau tujuan awalnya rumah yang ingin dibangunnya dibuat besar dari rumah tidak layak huni lainnya dengan kata lain bahwa penerima bisa membuat rumah sendiri tanpa menerima bantuan dari pemerintah. Adanya pembangunan tidak tepat sasaran akan memberikan efek negatif terhadap program fasilitasi dan stimulasi

pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu itu sendiri karena tujuan dan maksud dibuat program ini untuk pemenuhan terhadap sasaran yang dituju yaitu masyarakat miskin yang tidak bisa mengatasi dalam membangun atau merehabilitasi rumahnya sendiri.

Ketidaktepatan sasaran pembangunan merupakan salah satu hambatan yang terlihat dalam penyelesaian pembangunan rumah masyarakat kurang mampu. Seharusnya pelaksanaan pembangunan dilakukan pada masyarakat kurang mampu yang tidak bisa dalam merehabilitasi bangunan rumah sendiri. Tapi kenyataan dilapangan pada penerima bantuan, dia memperbesar bangunan yang tidak tampak seperti bangunan rumah program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu pada umumnya. Maka ini, dirasa kurang tepat sasaran karena dia bisa mampu memperbaiki rumahnya sendiri tanpa bantuan pemerintah walaupun jangka waktu agak lama tapi dia bukan masyarakat miskin kurang mampu yang bisa mengatasi atas pemenuhan hak-hak dasar rumah yang layak.

### **KESIMPULAN**

1. Hasil penelitian implementasi program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dilihat dari indikator-indikator yang dikemukakan oleh Edwards III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Aspek-aspek diatas berkaitan dengan jalannya implementasi program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Hal ini terbukti dengan kurang optimalnya sosialisasi dalam komunikasi ke masyarakat mengakibatkan ada rumah diperbesar tidak seperti masyarakat kurang mampu penerimanya, ketergantungan akan sumber dana yaitu dana yang didapat hanya untuk bahan bangunan dan satu pekerja bangunan sisanya masyarakat yang

harus cari cara untuk merealisasikannya agar dapat berjalan pembangunannya, sikap pelaksana masih kurang dalam mengawasi jalannya bangunan terbukti ada yang tidak tepat sasaran serta pembangian tugas diperlukan agar tidak tumpah tindih dalam pelaksanaan dan SOP yang sesuai rencana yaitu dana yang diperlukan, waktu yang tepat dalam penyelesaian serta sasaran yang tepat dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat kurang mampu tapi kenyataannya belum sesuai rencana waktu tidak tepat dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Faktor-faktor hambatan yang menghalangi terciptanya pelaksanaan yang sesuai dengan rencana seperti ketidaktepatan waktu dikarenakan cuaca yang buruk dan pendistribusian bahan bangunan tiba-tiba ada masalah, tenaga kerja pelaksana tidak melibatkan masyarakat dalam mengawasi jalannya bangunan, dan tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan pembangunan seharusnya diberikan kepada yang berhak tapi diberikan kepada orang yang memperbesar bangunan yang dimana terbukti bukan masyarakat miskin.

## SARAN

1. Untuk terlaksananya implementasi program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara maka perlu komunikasi yang baik antar Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan masyarakat penerima bantuan, sumber daya yang baik dengan anggaran yang tepat dalam perencanaan dan sikap pelaksana yang tidak cuek terhadap program serta struktur birokrasi yang baik seperti pembagian tugas yang tepat agar tidak tumpah tindih.

2. Agar tidak menghambat dalam implementasi fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu perlu meminimalkan waktu dengan penambahan pekerja bangunan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan jalan proses pembangunan agar sesuai SOP program tersebut sehingga tidak menimbulkan prasangka yang buruk di kalangan masyarakat seperti hanya formalitas antar penerima bantuan dengan pemerintah yaitu pembangunan tidak dijalankan tapi uang sudah mengalir ke pemerintah dan penerima bantuan tersebut dan juga perlunya koordinasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan pihak terkait yaitu masyarakat penerima bantuan dengan cara mengawasi jalannya pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan pembangunan seperti pembesaran pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang Press : Malang.
- Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin. 2003. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Ciputat Press : Jakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Nasution, Zulkarimen. 2007. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori Dan Pengenalannya*. PT. Raja Grafindo Parsada : Jakarta.
- Ardianto, Harun Elvinaro. 2012. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*. Rajawali Pers : Jakarta.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT.Refika Aditama : Bandung

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kronologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Direksi Cipta : Jakarta

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset : Jakarta.

Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Graha Ilmu : Yogyakarta.

Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Bumi Aksara : Jakarta.

Suandy, Erly. 2003. *Perencanaan Pajak, Edisi Revisi*. Salemba Empat: Jakarta.

Randy, Riant Nugroho. 2006. *Managemen Pembangunan Indonesia*. PT Gramedia Jakarta : Jakarta.

Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Clyapps Diponegoro University : Semarang.

Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan (Cetakan Pertama)*. PT. Uhindo dan Offset : Yogyakarta.

Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. SUN : Jakarta.

Suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta : Bandung.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Citra Utama, Jakarta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.

#### **Dokumen :**

Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Jabatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tebing Tinggi Nomor 460 Tahun 2016 tentang Penetapan Penerima Bantuan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kota Tebing Tinggi.

SK Walikota Tebing Tinggi Nomor 490 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kota Tebing Tinggi Tahun 2018